

DINAMIKA PESANTREN DALAM LINGKARAN NAHDLATUL ULAMA

Al furqan¹⁾, Zuhdiyah²⁾, Moh In'ami³⁾

¹Universitas Negeri Padang

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Institut Agama Islam Negeri Kudus

¹alfurqan@fis.unp.ac.id

²zuhdiyah_uin@radenfatah.ac.id

³mohinami@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Salah satu kekuatan yang dimiliki NU berupa kekuatan kultural dan ideologis sehingga warga nahdhiyyin (jama'ah) begitu semangat untuk mengelola pendidikan demi memperjuangkan terwujudnya cita-cita NU. Meskipun secarasecara manajerial hal tersebut tentunya kurang ideal. Untuk itu, NahdlatulUlama perlu memperkuat perannya sebagai regulator dan fasilitator bagi seluruh satuan pendidikan di lingkungan NU, baik milik jam'iyah maupun jama'ah. Pesantren NU harus melakukan berbagai macam transformasi, yaitu : pertama, Reorientasi kurikulum. Kedua, Kontekstualisasi kitab kuning. Ketiga, Membangun Perpustakaan. Keempat, Menggalakkan Penterjemahan. Kelima, Penerbitan. Keenam, Melakukan Pelatihan professional. Ketujuh, penguasaan tekhnnologi.

Kata Kunci: Pesantren, dalam lingkaran, nahdlatul ulama.

ABSTRACT

One of the strengths that NU has is in the form of cultural and ideological strength so that the nahdhiyyin (jama'ah) citizens are so eager to manage education to fight for the realization of NU's ideals. Although managerial, this is certainly not ideal. For this reason, NahdlatulUlama needs to strengthen its role as a regulator and facilitator for all education units within the NU, both Jam'iyah and jama'ah. NU pesantren must carry out various kinds of transformation, namely: first, curriculum reorientation. Second, contextualization of the yellow book. Third, Build a Library. Fourth, Promote Translation. Fifth, Publishing. Sixth, Conduct professional training. Seventh, mastery of technology.

Keywords: Pesantren, in a circle, nahdlatul ulama.

PENDAHULUAN

Sejarah pergerakan NU sebenarnya adalah sejarah pendidikan nusantara. Pohon organisasi NU sangat rimbun oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, majelis taklim, diniyyah, madrasah/sekolah dan perguruan tinggi. Dalam hal pendidikan, NU merupakan salah satu lokomotif pembaharuan pendidikan. Keberadaan pendidikan di wilayah NU berawal dari keberadaan pesantren. Para kiai pesantren, dahulu kala, ketika pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, sebagian besar mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan.

Seiring dengan sejarah perkembangannya, meskipun pesantren mampu berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu menelorkan para tokoh bangsa, namun keberadaan pesantren kurang mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Pendidikan di pesantren dianggap masih kolot dan terkebelakang karena hanya mengkaji dan mentelaah kitab-kitab klasik dan jauh dari sentuhan teknologi. Pesantren masih dianggap sebagai pabrik yang hanya mampu menghasilkan para kiai dan ustadz mengaji. Padahal, saat ini pesantren tidak lagi berkutat pada kurikulum yang bersifat keagamaan namun sudah menyentuh persoalan kemasyarakatan.

Bahkan pemerintah sendiri, sejak dikeluarkannya SKB Tiga Menteri sudah menempatkan pesantren sederajat dengan pendidikan formal lainnya. Hal itu berlanjut terus dengan terakomodirnya pesantren dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Kiprah pesantren semakin tampak dengan keterlibatannya mensukseskan wajib belajar 9 tahun.

Hanya saja nampak secara organisatoris Muhammadiyah lebih maju daripada NU, karena memang berdirinya Muhammadiyah (1912) lebih dahulu daripada NU (1926); namun secara personal (kualitas SDM) NU tidak ketinggalan bahkan lebih progresif. Hal ini bisa dilihat dari figur-figur semisal Wahid Hasyim, Gus Dur, Ulul Abshar Abdallah, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian perpustakaan (Library Research), karena data-data yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah ini diperoleh dari penelusuran dari literatur yang ada. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan.

PEMBAHASAN

Pesantren Dalam Lintasan Sejarah

Dalam beberapa literatur, pembicaraan mengenai istilah atau penamaan kata pondok pesantren memiliki banyak sekali perbedaan. Dari segi penamaan, Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia menurut sebagian pendapat berasal dari kata santri. Sedangkan kata santri itu berasal dari bahasa India shastri yang berarti buku-buku suci atau buku-buku agama. (Esiklopedi : 99). dalam bahasa Jawa, santri disebut dengan cantrik yang artinya seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru itu menetap. (Nurcholis Majid, 1997: 19-20) Santri bisa juga berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji (Zamakhsyari, 1982: 18).

Dari beberapa pendapat di atas, untuk mendefinisikan arti kata santri dapatlah ditarik benang merah. Bila diambil pendapat pertama yang mengatakan santri berarti buku suci atau buku agama hal itu memang tepat karena apa yang diajarkan di dalam pesantren mulanya adalah kitab suci al-qur'an dan kitab-kitab klasik yang sudah berwarna kuning. Kalau dikatakan berasal dari bahasa Jawa, cantrik yang artinya seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru itu menetap, itu juga dapat diterima karena para santri memang harus berada dan mengikuti gurunya serta tinggal ditempat gurunya. Pendapat terakhir yang mengatakan santri berasal dari bahasa Tamil, sattiri yang berarti guru mengaji juga dapat diterima, karena para santri yang memperdalam agama haruslah kepada ustazd atau kiainya atau yang disebut dengan guru mengaji.

Kata pesantren digandengkan juga dengan kata pondok. pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Kata pondok dapat juga dilihat dari bahasa Arab, funduk yang berarti hotel atau asrama (Hasbullah, 1996: 138). Penggandengan kata pondok ke dalam istilah pesantren, sangatlah tepat, karena adanya pondok atau tempat belajar menjadi salah satu unsur pokok adanya pesantren.

Pertanyaan yang juga cukup pelik untuk dijawab adalah mengenai sejarah dan asal-usul kemunculan pondok pesantren. Terdapat dua versi mengenai asal usul dan latar belakang berdirinya pesantren:

Pendapat pertama mengatakan, bahwa pesantren berakar dari tradisi Islam itu sendiri yaitu tarekat. Berdasarkan fakta sejarah bahwa pesantren memiliki kaitan erat



dengan tempat pendidikan para sufi. Dalam kegiatan tarekat terdapat kegiatan rutinitas empat puluh hari dalam satu tahun atau yang disebut suluk. Kiai mengajarkan amalan tarikat dan kitab-kitab agama di suatu tempat khusus yang terletak di samping masjid. Aktivitas itu dinamakan pesantren. (Ensiklopedi HI, tt:100)

Pusat-pusat penyebaran Islam yang pertama di Indonesia khususnya di Jawa seperti di daerah Ampel dan Giri merupakan sambungan zawiyah yang pernah ada di India atau Timur Tengah. Zawiyah adalah tempat pemondokan yang menampung para fakir yang hendak melakukan wirid atau suluk. Dalam perkembangannya zawiyah berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan politik. (Nurcholis, 1997: 55)

Sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri pesantren pertama kali didirikan oleh Sekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Gresik (1419 H). Tujuannya adalah agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka langsung terjun ke tengah masyarakat (Alwi Shihab, 2002: 23)

Pendapat di atas bisa diterima, karena pesantren memang memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Sehingga ia disebut sub culture yang bersifat idiosyncratic. Akar historis cultural pesantren tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang bercorak sufistik. Pesantren juga menyerap budaya masyarakat jawa pedesaan yang cenderung statis dan sinkretis.

Pendapat kedua mengatakan, pesantren merupakan pengambil alihan dari system pendidikan orang-orang Hindu-Budha di Nusantara. Berdasarkan fakta sejarah bahwa jauh sebelum Islam datang sudah ada lembaga pesantren yang mengajarkan ajaran agama Hindu-Budha yang bertempat di suatu pemondokan yang bernama mandala atau asrama. Pesantren merupakan sekumpulan komunitas independen yang mengisolasi diri ke pegunungan (lihat Amin Haedari, dkk, 2005: 2). Pendapat tersebut dapat diterima sebagaimana yang diungkap oleh Nurcholis Majid (1997: 3) bahwa pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (Indigenous).

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren bukan hanya bertujuan mendidik anak untuk pandai mengaji al-Qur'an, tetapi juga diajarkan ilmu-ilmu agama lainnya yaitu, ushuluddin, ushul fiqh, ilmu alat dan ilmu bahasa. Dengan demikian, Pondok pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang didalamnya terdapat interaksi

edukatif antara kiai, ustdz dan santri dengan mengambil tempat di musholah, masjid, kelas, atau asrama untuk mengaji dan membahas kitab-kitab klasik/kitab kuning.

Di samping pesantren yang berada di pusat Tanah Jawi, terdapat juga pendidikan Islam lainnya, seperti surau yang terdapat di Minangkabau. Di Aceh terdapat Dayah atau madrasah. Namun, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut terancam eksistensinya ketika kedatangan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan pendidikan model Barat yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan sekelompok kecil orang Indonesia. Selanjutnya Belanda memperlakukan politik etis yang mendirikan dan menyebarluaskan pendidikan rakyat sampai pedesaan (Karel A. Steenbrink, 1986: 24).

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Pada tahun 1905 pemerintah mengeluarkan peraturan lagi yang isinya bahwa orang-orang yang mengajarkan agama harus meminta izin dahulu kepada pemerintahan Belanda. Tahun 1925 peraturan semakin keras yaitu semua orang tidak boleh melakukan pengajaran agama (Zuhairini, 1997: 149).

Kerasnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh kolonial Belanda tersebut, tentulah dilatabelakangi oleh ketakutan-ketakutan Belanda akan kebangkitan pribumi. Namun sekeras dan seketat apa pun peraturan ternyata ruh keislaman yang sudah membumi pada jiwa rakyat tidak mampu dibendung dan dipatahkan begitu saja.

Perjuangan pesantren untuk mempertahankan eksistensinya kembali diuji dengan kedatangan pemerintahan Jepang. Banyak kiai di tangkap, pendidikan pun menjadi terbengkalai. Pelajar setiap hari dipaksa untuk bekerja. Namun pesantren luput dari pengawasan Jepang sehingga pendidikan Islam di lingkungan pesantren masih berjalan dengan wajar (Hanun, 1999: 176).

Pada masa kemerdekaan, perubahan lambat laun mulai dialami pesantren. Pemerintah memberikan penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah ada. Eksistensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No.5 Tahun 1950, yang sampai sekarang masih berlaku, dimana dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar (Zuhairini: 236).



Kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan mutu pesantren didukung juga oleh kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pesantren sejak Repelita II melalui departemen lain dengan mengarahkan peningkatan mutu pada dua bidang kemampuan, yaitu: pertama, Kemampuan dalam ilmu agama secara teoritis dan praktis. Kedua, Kemampuan keterampilan dan kejuruan (Arifin, 1995: 237).

Dengan demikian pesantren semakin hari semakin mantap kedudukannya dalam mengemban misi pendidikan. Pesantren pun semakin tumbuh subur di tengah masyarakat, baik daerah pedesaan, pinggiran kota, mau pun perkotaan. Data terakhir Departemen Agama Tahun 2001, jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11,312 buah dengan santri sebanyak 2,737,805 orang (Amin Haedari, 2004: 15).

Sekarang ini, banyaknya jumlah pesantren dapatlah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, (lihat, Zamakhshyari dalam Amin Haedari (2005: 27), yaitu: pertama, Pesantren kecil, yang mempunyai santri di bawah seribu dan pengaruhnya hanya terbatas di tingkat kabupaten atau kota. Kedua, pesantren menengah, dengan jumlah santri antara seribu sampai dengan dua ribu orang, mempunyai pengaruh dan menarik santri-santri di beberapa kabupaten. Ketiga, pesantren besar di samping mempunyai popularitas juga menarik simpati para santri di seluruh tanah air, bahkan sampai ke negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura dan Brunei Darussalam.

Ada pun pola penyelenggaraan pesantren di klasifikasikan menjadi tiga: (Mahmud, 2006: 16-18)

1. Pesantren tipe salafiyah, memiliki ciri-ciri:
 - a. Para santri belajar dan menetap di pesantren
 - b. Kurikulum tidak tertulis secara eksplisit, tetapi berupa hidden kurikulum (kurikulum tersembunyi yang ada pada benak kiai)
 - c. Metode pembelajaran asli pesantren, yaitu sorogan, bandongan, dan lain-lain
 - d. Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan system madrasah.
2. Pesantren tipe khalafiyah, memiliki ciri-ciri:
 - a. Para santri tinggal dalam pondok/asrama
 - b. Pemaduan antara pola pembelajaran asli pesantren dengan sistem madrasah (sekolah)
 - c. Terdapat kurikulum yang jelas

- d. Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah/madrasah.
3. Pesantren tipe kombinasi, memiliki ciri-ciri:
 - a. Pesantren hanya semata-mata tempat tinggal (asrama) bagi para santri
 - b. Para santri belajar di madrasah / sekolah yang letaknya di luar dan bukan milik pesantren
 - c. Waktu belajar pesantren biasanya malam atau siang hari pada saat santri tidak belajar di sekolah / madrasah
 - d. Umumnya pembelajaran tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas

Di samping tiga tipe pesantren di atas, ternyata di setiap bulan romadhon banyak pula bermunculan pola pesantren kilat yang di adakan di sekolah-sekolah dan madrasah. Hal ini membuktikan bahwa pola pendidikan pesantren telah diakui mampu membentuk manusia yang berkarakter atau dalam bahasa agama insan yang beriman, berilmu dan berakhlak.

Selayang Pandang Tentang Nahdlatul Ulama

Dari pengamatan terhadap beberapa tulisan tentang asal-usul pendirian Nahdatul Ulama dapat disimpulkan beberapa tesis. Pertama, bahwa aktivitas Muhamadiyah dan Syarikat Islam (kelompok Pembaharu) merupakan faktor penting yang mendorong berdirinya NU; kedua, konflik-konflik tajam antara kelompok pembaharu dan kelompok tradisional merupakan pendorong berdirinya Nahdatul Ulama; ketiga, kemauan mempertahankan tradisi keagamaan dan menandingi gagasan-gagasan dan praktek-praktek yang telah dikenalkan pembaharu hingga mendorong terbentuknya Komite Merembuk Hijaz adalah faktor penentu berdirinya Nahdatul Ulama (Bruinessen, 1994: 18, Steenbrink, 1991: 68).

Para ulama senior dari seluruh Jawa dan Madura bermusyawarah di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 dengan menempatkan masalah Hijaz sebagai pokok pembicaraan utama. Saat itu ditetapkan menjadi tanggal kelahiran perkumpulan ini sebagai organisasi sosial keagamaan (Yusuf, 1983: 18-19). Dalam pertemuan itu diambil keputusan paling penting: pertama, meresmikan dan mengukuhkan komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui raja Sa'ud kembali ke tanah air, kedua, membentuk organisasi atau jam'iyah untuk persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terwujudnya cita-cita *Izzul Islam Wa al Muslimin*. Atas usul dari Alwi Abdul Aziz, Jam'iyah ini diberi nama Nahdatul Ulama (Abubakar, 1957: 471).



Jam'iyah Nahdatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M. dimotori oleh K.H. Wahab Hasbullah, dan dipopulerkan KH. Hasyim Asy'ary. Selanjutnya Nahdatul Ulama telah diakui sebagai organisasi berbadan hukum, setelah anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Belanda pada tanggal 6 Pebruari 1930 (Stoddard, 1996: 323).

Nahdlatul Ulama adalah organasasi para ulama (bentuk jama dari alim yang berarti orang yang berilmu) adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang bersangkutan paut dengan agama. Dalam tradisi Islam ulama dijuluki sebagai pewaris Nabi Besar Muhammad SAW. Tanpa mereka kontiuitas ajaran dan tradisi Islam itu tidak akan berhasil. Di samping itu ulama mempunyai wibawa yang kuat di mata umat. Dengan didorong motif agama dan nasionalisme, berdirinya Nahdlatul Ulama juga didorong semangat untuk mempertahankan faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Bagi Nahdlatul Ulama memberlakukan ajaran Islam menurut aliran Ahlussunnah wal Jama'ah tidak terlepas dari pengakuan terhadap ajaran keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan peranan bimbingan para ulama. Pengertian Ahlussunnah Wal Jama'ah menjadi berkembang karena penegasan kaum tradisional menanggapi gerakan kaum pembaharu bahwa memahami ajaran Islam tidak cukup hanya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, tetai harus melalui jenjang tertentu, yaitu ulama, mazhab, hadist (sunnah) dan akhirnya pada sumber utama yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Itulah sebabnya pengertian Ahlussunnah wal Jama'ah bagi Nahdlatul Ulama adalah para pengikut tradisi Nabi Besar Muhammad SAW dan ijma' ulama. (Dhofier, 1982: 148; lihat juga Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, pasal 2, 1926).

Nahdlatul Ulama tidak menentang ijtihad (penalaran) tetapi memikirkannya dalam konteks bagaimana pendapat bahwa Al-Qur'an dan Hadist disampaikan kepada kaum muslimin dengan bahasa yang tidak mudah untuk difahami dan penuh dengan simbolisme yang dapat lebih mudah dimengerti melalui tafiran-tafsiran yang diberikan para imam dan ulama-ulama terpilih. Dengan kata lain para ulama memikirkan bagaimana ajaran Islam dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh umat Islam.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama tahun 1926, Nahdlatul Ulama menetapkan tujuannya adalah untuk mengembangkan Islam berlandaskan ajaran keempat mazhab di atas. Tujuan itu diusahakan dengan:

1. Memperkuat persatuan di antara sesama ulama penganut ajaran-ajaran empat mazhab.
2. Meneliti kitab-kitab yang akan dipergunakan untuk mengajar sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah.
3. Menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran empat mazhab.
4. Memperbanyak jumlah lembaga pendidikan Islam dan memperbaiki organisasinya
5. Membantu pembangunan masjid, surau dan pondok pesantren serta membantu kehidupan anak yatim dan orang miskin.
6. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan perekonomian anggota.

Di antara yang melatar belakangi timbulnya usaha –usaha Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan adalah:(Hasil-Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28, Pengurus Besar NU, Jakarta, 1989: 153-154).

1. Orientasi pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama harus ditata kembali dengan mengembangkan cara baru yang tepat, guna mengukur kemampuan anak didik dalam melakukan kerja nyata kemanusiaan dan kemasyarakatan, serta diarahkan pada pengenalan hajat hidup dan sumber pemenuhannya tanpa menggoyahkan sikap yang dilandasi aqidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jama'ah.
2. Keterbukaan, kemandirian dan kemampuan bekerjasama dengan pihak lain untuk menyusun masa depan yang lebih baik serta ketrampilan mengamalkan ilmu dan teknologi yang merupakan perwujudan dan pengabdian kepada Allah SWT dan menciptakan sikap yang berorientasi kepada kehidupan dunia dan akhirat yang imbang dan dinamis, tercermin dalam kurikulum pendidikan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan masa kini.
3. Pemahaman hukum agama yang praktis bagi kehidupan masyarakat , meningkatkan solidaritas sosial antara anak didik dengan kaum yang tidak punya dengan menanamkan jiwa rifqah (belas kasihan) , taawun (tolong menolong) dan Mawaddah warrahmah (kasih sayang) dan sebagainya .Kesadaran akan perlunya menggunakan pendekatan aqal (rasio) dalam kehidupan mereka perlu memiliki antisipasi dan menatap ke depan (future oriented) terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta dampaknya

dalam kehidupan kelak. Menumbuhkan jiwa mandiri dan kreatif melalui latihan-latihan ketrampilan praktis.

4. Pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari pendidikan nasional diarahkan pada pemberian porsi lebih besar di bidang pendidikan non formal, kejuruan dan ketrampilan melalui lembaga-lembaga keagamaan, pesantren, majlis ta'lim mengembangkan pendidikan bengkel –bengkel rintisan untuk menerapkan teknologi tepat guna, serta mengembangkan hubungan interaktif dalam proses belajar mengajar dan proses komunikasi timbal balik antara guru, murid, para perencana pendidikan serta pengelolanya. Meskipun demikian pendidikan formal sekolah akan tetap memperoleh perhatian yang memadai, khususnya pada tingkat sekolah lanjutan dan perguruan tinggi dalam rangka mencetak kaum intelektual di berbagai bidang keilmuan.

Pesantren Nahdlatul Ulama: Suatu Tinjauan Kritis

Menyingkap dunia pesantren dan menatap wajah Islam di Indonesia ibarat menatap salah satu sisi mata uang logam, hal tersebut didasarkan pada konteks peranan dunia pesantren dalam membangun wajah Islam di Indonesia yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena basis utama pengembangan Islam di Indonesia adalah pondok pesantren.

Dalam dunia pesantren, nilai-nilai yang dikembangkan dirujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Pemahaman terhadap sumber ajaran tersebut membawa pesantren untuk mengkaji fiqh, tauhid dan tasauf sebagaimana yang dikembangkan ahlussunnah wal jama'ah. Lebih dari itu peran pesantren yang utama adalah, lulusannya diharapkan memiliki kelebihan dari sisi akhlakul karimah, karena pesantren sudah semestinya menjadi pengawal bagi akhlak yang terpuji ini.

Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri walau unsur-unsurnya sama. Keragaman karakteristik ini merupakan kekuatan dan sekaligus keunikan. Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Kyai menempati posisi sentral dalam lingkungan pesantren, karena ia bisa sebagai pemilik, pengelola, dan pengajar, serta imam pada acara-acara keagamaan yang diselenggarakan. Unsur lainnya (masjid, asrama, santri, dan kitab kuning) bersifat subsidi, dibawah kendali kyai. Dengan unsure-unsur

yang dimilikinya, pondok pesantren telah menjadi pusat pembelajaran (training centre) dan pusat kebudayaan (cultural centre).

Didirikannya Nahdatul Ulama adalah untuk menjadi wadah bagi usaha untuk mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian yang tidak lagi terbatas pada kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Pada Mukhtamar NU tahun 1927, warga NU bersepakat menggalang dana untuk mendirikan madrasah dan sekolah. Pada Mukhtamar berikutnya tahun 1928, para elite NU yang dipimpin oleh KH.Wahab Chasbullah mengadakan gerakan peduli pendidikan dengan mengunjungi pesantren-pesantren kenamaan di Jombang dan Nganjuk Jawa Timur. Penting untuk dicatat bahwa, pesantren dengan berbagai kegiatan pendidikan di dalamnya, termasuk yang menggunakan sistem klasikan modern, pada masa-masa itu sudah berkembang mendahului gagasan pengembangan pendidikan yang dikembangkan oleh organisasi. Pada Mukhtamar tahun 1929 juga diputuskan ada badan khusus di tubuh Hoof Bestur Nahdlatul Ulama (HBNU) yang menangani bidang pendidikan yang waktu itu diketuai oleh Abdullah Ubaid. (Zamzami, Opini)

Meski sudah diakui sebagai organisasi yang berbadan hukum, namun sampai tahun 1945, NU masih tetap merupakan organisasi yang belum diatur secara tegas. Dari pusat sudah ada kegiatan yang diatur secara sentral, namun untuk sebagian besar pemimpin pesantren masih tetap melanjutkan kegiatan lama seperti biasanya. Hal ini menurut Karel A Steenbrink (1974: 69) tujuan umum NU pada permulaannya tidak dirumuskan secara tegas seperti Muhammadiyah dan PERTI. Di bidang pendidikan, tidak pula dibicarakan pembaharuan seperti kedua organisasi tersebut.

Lebih lanjut Karel A Steenbrink (1974: 71-72) juga mengungkapkan NU tidak mempunyai statistik yang pasti mengenai pendidikannya yang disebabkan oleh sifat organisasinya yang agak longgar, sehingga tidak diketahui secara pasti kapan sebenarnya NU mengadakan pembaharuan pendidikan. Namun bisa dipastikan tahun 20-an dan 30-an, Tebuireng merupakan pesantren paling masyhur di seluruh Indonesia dengan kurang lebih 6000 orang santri dan sistem yang dikembangkan Pesantren Tebu Ireng memberikan sumbangan besar bagi dunia Islam terutama wilayah Jawa Timur dan Madura.

Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren adalah pembangunan jaringan kerjasama kelembagaan dengan pesantren lainnya, secara informal pesantren telah menjalin hubungan dengan pesantren lainnya melalui

hubungan kekerabatan atau jalinan perkawinan. Namun baru pada muktamar NU ke XXII tahun 1954 Gagasan itu menemukan bentuknya secara organisatorik untuk menangani kerjasama antar pesantren khususnya yang berafiliasi NU, terlembaga dalam sebuah organisasi yang bernama Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah atau RMI. (Amin Haedari, 2006: 169-170). Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah (RMI) adalah asosiasi Pondok Pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Saat ini Pondok Pesantren yang bergabung dengan RMI mencapai 23.000 buah di seluruh Indonesia. Di sinilah kekuatan Nahdlatul Ulama, mulai dari kapital sosial, ekonomi, budaya, hingga manusia.

Di tahun itu, satuan-satuan pendidikan yang ada di dalam maupun di luar pesantren yang dikembangkan oleh warga NU sudah demikian banyak jumlahnya. Mereka mengembangkan pendidikan sebagai bentuk komitmen dari apa yang sudah dicita-citakan oleh NU. Dalam konteks ini, tugas organisasi sesungguhnya lebih pada menganyomi, mengkoordinasikan dan meningkatkan mutu pendidikan yang sudah dikembangkan. Tentu saja, NU berkepentingan untuk mendirikan, menyelenggara dan mengelola beberapa satuan pendidikan yang secara hukum menjadi aset organisasi. Satuan-satuan pendidikan ini idealnya berfungsi sebagai pionir dan model percontohan bagi satuan-satuan pendidikan di lingkungan NU lainnya.

Selanjutnya, pada Muktamar ke-30 tahun 1999 di Lirboyo Kediri, NU membuat kebijakan penting di bidang pendidikan. Ditegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu maistream dalam program kerja NU, mengingat organisasi ini sendiri dilahirkan dari serangkaian proses sejarah yang didalamnya terjadi pergulatan pemikiran keagamaan dan keummatan. LP Ma'arif NU sendiri pada Rakernas Tahun 2001 kemudian memetakan adanya 3 (tiga) kelompok satuan pendidikan di lingkungan NU yaitu: (1) satuan pendidikan yang didirikan oleh LP Ma'arif NU, (2) satuan pendidikan yang didirikan oleh jama'ah atau lembaga lain di lingkungan NU yang bekerjasama dengan LP Ma'arif NU dalam pengelolaannya, dan (3) satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh jama'ah atau lembaga lain di lingkungan NU. Ketiga kelompok tersebut dianggap sebagai satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU. Begitupun dengan lembaga non-formal lainnya. (Zamzami: Opini)

Tak dapat dipungkiri, terdapat ribuan satuan pendidikan di lingkungan NU mulai dari yang formal hingga non formal, baik yang dikelola oleh jama'ah (warga NU) maupun jamiyyah (organisasi). Kedua bentuk satuan pendidikan tersebut, meskipun

tidak terkoordinasi menurut kaca mata organisasi modern, ternyata menyatu dalam kekuatan kultural dan ideologis untuk sama-sama mengibarkan semangat pendidikan berhaluan ahlussunnah waljamaah. Tidak sedikit, yang menggunakan nama dan lambang organisasi sebagai wujud kebanggaan sebagai warga NU. Kenyataan seperti itu secara manajerial tentu kurang ideal, namun menjadi kekuatan tersendiri yang sesungguhnya menguntungkan NU. Semangat untuk mengelola pendidikan demi memperjuangkan terwujudnya cita-cita NU ternyata tumbuh begitu kuat di kalangan warga NU.

Di dalam masyarakat berkultur NU, terdapat semacam pembagian kelas, yaitu kelas kiai (ulama) yang berperan sebagai guru dan pendapatnya hampir tidak terbantahkan dan kelas pengikut. Para fungsionaris LP Ma'arif mau pun Rabithoh baik di tingkat pusat maupun daerah kebanyakan terdiri dari kelas pengikut. Sehingga dapat dililaht di banyak kasus tentang kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran dikendalikan tidak hanya oleh Ma'arif, tetapi juga dipengaruhi oleh individu ulama atau kiai. Pengaruh kiai kadang-kadang tidak sejalan dengan kebijakan Ma'arif. Dengan berdasar pada pengaruh yang dimiliki, para kiai sering merasa dapat ikut mengatur jalannya organisasi, bahkan kadang-kadang dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan lain, termasuk aturan main yang telah disepakati bersama.

Secara umum, jenis problematika pendidikan yang dialami pendidikan NU adalah berkisar persoalan klasik yang rentan dialami, misalnya, persoalan manajemen, kelembagaan, dokumentasi, profesionalisme, dan sejenisnya. Untuk itu, kiranya perlu dirumuskan kembali langkah-langkah strategis untuk memberdayakan pendidikan di lingkungan NU. Nahdlatul Ulama perlu memperkuat perannya sebagai regulator dan fasilitator bagi seluruh satuan pendidikan di lingkungan NU, baik milik jam'iyah maupun jama'ah.

Yang terbaik dalam melakukan transformasi pendidikan pesantren di tubuh NU, akar tradisi hendaknya terus dikelola sambil terus melakukan pembenahan dan perubahan secara bertahap. Karena jika bertindak secara radikal dalam perubahan pesantren maka akan menghilangkan dinamika positif dari pesantren itu sendiri. Ada pun upaya pengembangan pesantren dapat dilakukan dengan cara :

1. Reorientasi kurikulum. Pengembangan pesantren tidak cukup dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren. Karena pesantren sendiri sudah menjadi bagian dari sisdiknas. Penataan struktur kurikulum pesantren berkaitan erat dengan ciri dari pondok pesantren itu

sendiri. Secara umum struktur kurikulum pesantren dipilah dalam dua bidang kompetensi: (Amin Haedari, 2006: 45-46)

- a. Penguasaan suatu bidang ilmu keislaman secara mendalam. Pesantren harus mampu menonjolkan cirri khas keilmuan yang dikembangkan. Hal ini dimaksud untuk pembeda dengan pesantren yang lain dan memudahkan masyarakat mengenali pesantren berdasarkan kekhususan cabang ilmu yang dikembangkan. Misalnya, pesantren dengan ciri khas ilmu qiraat, bahasa, tahfizhul qur'an dan sebagainya.
- b. Penguasaan keterampilan hidup (lifeskill) yang aplikatif di dunia kerja. Pesantren membuka laboratorium keterampilan praktis, misalnya di bidang pertanian, perikanan, perbengkelan, tata boga, perkantoran dan sebagainya.

Selama ini kurikulum pesantren tidak tertata dan terstruktur dengan baik, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Arab, tampak dari muatan materi dari berbagai kitab yng memiliki isi yang nyaris serupa sehingga terjadi pengulangan dan ketidak efektifan waktu mempelajarinya. Misalnya kitab jurmiyah, imrithy, mutammimah dan nazmul maqsud merupakan kitab yang dipelajari di tingkat dasar dan menengah. Sedangkan untuk tingkat atas dipelajari alfiyah ibn Malik (Amin Haedari, dkk, 2005: 141).

Agar pendidikan dapat berlangsung efektif, efisien dan tidak terjadi pemborosan waktu, maka Abdurrahman Wahid (2001: 121) memberikan solusi. Terkait dengan pembenahan kurikulum pengajaran, maka yang patut diperhatikan dalam penyusunan kurikulum pengajaran yaitu menghindari pengulangan sepanjang tidak dimaksudkan untuk pendalaman dan penjenjangan. Juga diberikan penekanan pada latihan dan praktik.

Untuk melakukan re-orientasi kurikulum, yang pertama kali dilakukan adalah merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan pondok pesantren. Dalam menetapkan visi dan misi pendidikan pesantren, hendaknya tidak berkutat kaku pada realitas duniawi, namun perlu juga mempertimbangkan makna tatanan kehidupan transenden, ukhrowi. Visi misi pesantren harus dibangun atas dasar orientasi: (Mastuki, 2004: 3-4)

- a. Komitmen yang kuat dan mampu mendorong inisiatif bagi tumbuhnya kreasi cerdas pihak lain
- b. Melahirkan makna strategis bagi kehidupan anggota organis pesantren

- c. Menentukan standar mutu yang tinggi
- d. Mengintegrasikan pemikiran yang tengah terjadi dengan kondisi masa depan

Dalam mencapai tujuan yang dituangkan ke dalam misi pesantren harus merumuskan program-program secara detail diuangkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat diketahui secara bersama terutama orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pesantren

2. Kontekstualisasi kitab kuning. Dalam tradisi pesantren, kitab kuning merupakan ciri dan identitas yang melekat. Keberadaan kitab kuning yang umumnya bukan tulisan ulama Indonesia belum tentu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, demikian juga dengan kemampuan santri.

Dalam sudut metodologis, pembelajaran Kitab kuning juga tidak berlangsung efektif. Kuatnya tradisi riwayat dalam model sorogan, wetonan, hafalan dan halaqoh berdampak pada tradisi lumpuhnya penalaran di kalangan pesantren. Lumpuhnya penalaran ini juga disebabkan orientasi keilmuan pesantren menitik beratkan pada ilmu-ilmu terapan, hal itu dapat mengakibatkan lemahnya kreativitas dalam memahami realitas global.

Agar pembelajaran kitab kuning bisa efektif, hendaklah memadukan model sorogan, wtonan, hafalan, halaqoh dan diskusi. Dan untuk menghidupkan semangat ijtihad santri maka dipadukan juga metode muzakarah.

Jika pada zaman Rosulullah dan para sahabat sangat menjunjung tinggi perbedaan pendapat begitu pun tradisi diskusi dan budaya kritis diakui, maka sudah selayaknya juga tradisi seperti itu kembali dihidupkan di pondok pesantren agar kedewasaan berfikir dapat senantiasa terpelihara.

3. Membangun Perpustakaan. Perpustakaan merupakan hal yang sangat penting dalam institusi pendidikan. Perpustakaan juga mempunyai peranan penting dalam transmisi pengetahuan. Dalam sejarah pendidikan Islam didapati bahwa salah satu aspek yang membuat Islam berada pada kemajuan peradaban adalah dengan munculnya perpustakaan. Penguasa bani Abbasiyah telah mendirikan baik perpustakaan umum mau pun perpustakaan pribadi di istana mereka. Di setiap perpustakaan disimpan beribu-ribu buku dan disiapkan ruangan untuk menyelenggarakan halaqoh. (Hanun, 1999: 69) Khalifah al-Ma'mun merupakan salah seorang pelopor pendiri perpustakaan baitul hikmah

di Baghdad, kemudia muncul perpustakaan-perpustakaan lain di dunia Islam, yaitu al-Munaji (275 H) di Basrah, Darul Ilmi (991 H) perpustakaan sekolah tinggi di Nizamiyah, perpustakaan khalifah al-Hakim di Spanyol. (Amin Haederi, 2004: 142-143)

Dengan demikian, pesantren memang harus membangun dan menghidupkan perpustakaan untuk menampung semua literature dunia baik Islam Arab, Timur Tengah, bahkan Barat sekalipun. Semakin banyak buku yang terkumpul semakin melaut pula khazanah pengetahuan dan semakin terbuka dengan lebar jendela dunia.

4. Menggalakkan Penterjemahan. Jika menengok sejarah, maka akan tampak sumbangan para penterjemah dalam kemajuan suatu bangsa. Seiring dengan semangat pencarian ilmu, jika tumbuhnya tradisi pengumpulan ilmu maka niscaya akan tumbuh pula tradisi penterjemahan. Tradisi ini sudah ada sejak masa awal Islam. Tokoh penterjemah baik dari kalangan muslim, Kristen, yahudi majusi dikumpulkan oleh khalifah, diberikan tempat khusus yang dilengkapi seluruh fasilitas hidup yang memang diperkerjakan untuk melakukan penterjemahan. (Ahmad Mujib, 2006: 32-33) Tradisi penterjemahan itu juga harus dihidupkan di pesantren karena masih banyak khasanah intelektual yang terpendam dan belum tersentuh dan terbaca ummat.
5. Penerbitan. Tradisi penterjemahan terkait dengan penerbitan. Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan maka penerbitan mutlak diperlukan. Sayangnya sangat sedikit terjemahan atau karya langsung dari para kiai yang diterbitkan. Menurut Amin Haedari (2004: 147-150) ada beberapa keuntungan yang dimiliki pesantren kalau memiliki penerbitan sendiri, yaitu:
 - a. Penerbitan mampu memfasilitasi kiai atau ustadz yang sudah berkarya
 - b. Penerbitan mampu memunculkan ghirah tradisi penulisan intelektualitas
 - c. Mengefektifkan dakwahDengan keuntungan itu, sudah selayaknya pesantren membuat dan menyediakan lahan penerbitan di pondok pesantren.
6. Melakukan Pelatihan professional. Pelatihan harus memberikan kemampuan kepada ustadz dan santri untuk mengembangkan keahlian/keterampilan guna memenuhi standar keterampilan yang tinggi pelatihan untuk ustadz dan kiai bisa mencakup aspek manajemen dan metodologi pembelajaran. Pelatihan buat santri disesuaikan dengan minat dan bakat.

7. Penguasaan teknologi. Mengaitkan persoalan teknologi dengan agama merupakan pemikiran yang menantang, karena seringkali dipandang sebagai ajaran yang memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan yang ritualistik dan normatif. Padahal kalau kita telusuri pandangan al-Qur'an tentang teknologi, mengundang kita, melihat sekian banyak ayat al-qur'an yang berbicara tentang alam raya. Menurut sebagaimana 'ulama ada sekitar 750 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang alam materi dan fenomenanyadan yang memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkan alam ini. (Quraisy Shihab, 1992: 441) Dengan demikian, pesantren sebagai institusi pendidikan keislaman sudah seharusnya peduli dan mengembangkan lptek sebagai bagian dari sarana untuk menunjang pendidikan di era globalisasi.

SIMPULAN

Salah satu kekuatan yang dimiliki NU berupa kekuatan kultural dan ideologis sehingga warga nahdhiyyin (jama'ah) begitu semangat untuk mengelola pendidikan demi memperjuangkan terwujudnya cita-cita NU. Meskipun secarasecara manajerial hal tersebut tentunya kurang ideal. Untuk itu, Nahdlatul Ulama perlu memperkuat perannya sebagai regulator dan fasilitator bagi seluruh satuan pendidikan di lingkungan NU, baik milik jam'iyah maupun jama'ah. Pesantren NU harus melakukan berbagai macam transformasi, yaitu: pertama, Reorientasi kurikulum. Kedua, Kontekstualisasi kitab kuning. Ketiga, Membangun Perpustakaan. Keempat, Menggalakkan Penterjemahan. Kelima, Penerbitan. Keenam, Melakukan Pelatihan professional. Ketujuh, penguasaan tekhnnologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqan, A. (2020). Revitalisasi Khazanah Surau dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern.
- Ahmad, C., Alfurqan, A., & Diyanto, R. (2019). MANUSKRIP IJAZAH DAN SILSILAH TAREKAT: Legitimasi Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah dan Syattariyah di Minangkabau. Hadharah.
- Alfurqan, (2015). Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren Dan Upaya Pembenahannya. Hal. 209. UNP Press.
- Arifin, Kapita Selekt Pendidikan, (Islam dan Umum), Jakarta : Bumi Aksara , 1995
- Asrohah, Hanun , Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta : Logos, 1999



- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning , Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* , Bandung: Mizan, 1995.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES, 1983.
- Haedari, Amin, *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern*, Jakarta : Diva Pustaka, 2004.
- Haedari, Amin, *Transformasi Pesantren : Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*, Jakarta: Media Nusantara, 2006
- Haedari, Amin, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2005
- Haedari, Amin, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: IRD Press, 2006
- A.Steenbrink, Karel, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Mahmud, *Model-Model Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta: Media Nusantara, 2006
- Majid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1999
- Mastuki, dll, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren : Suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama*, 2004
- Mujib, Ahmad , *Landasan Etika Belajar Santri*, 2006, Jakarta: Mitra Fajar Indonesia
- Shihab, Alwi , *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2002
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- PBNU, *Program Dasar Pengembangan Lima Tahun NU (Keputusan Muktamar NU ke XXVI)*, Semarang, 1979.
- PBNU, *NU kembali ke Khittah 1926*, Bandung : Risalah Bandung, 1985.
- PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar NU ke-28* , Jakarta , 1989.
- Rahardjo, Dawan, *Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan*, dalam *Dawam Rahardjo (Ed) Pesantren dan Pembaharuan*, 1995, Jakarta : LP3ES
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, 1992, Bandung : Mizan
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992, hal 295
- Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Jakarta , Panitia Penerbit, 1966
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, 2001, Yogyakarta: LKIS.

Ya'kub, Muhammad ,Kopontren: Keberadaan dan Pengembangannya, 1992, Jakarta:
Balitbangkop, Depkop

Ya'kub, Muhammad, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU 1984/1985,
Jakarta, 1985.

Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, 1997, Jakarta: Bumi Aksara

